

POTENSI MEDIA SEBAGAI RUANG PUBLIK

Analisis Kritis terhadap Wacana Referendum dalam Konflik Aceh pada Harian Umum *Media Indonesia* Tahun 1999)

Hasil penelitian ini membenarkan sejumlah kelemahan media dalam menempatkan dirinya sebagai ruang publik. Melalui studi wacana Fairclough dengan metode analisis isi kualitatif dan pembingkaihan (framing) Gamson dan Modigliani didapatkan temuan sebagai berikut. Pertama, Media Indonesia kental memperlihatkan ideologi pemilik—Surya Paloh—dalam konstruksi teks. Penerjemahan ideologi dilakukan dengan “patuh” dalam aktivitas rutinitas media (media routine) dan menjadi panduan dalam memandang referendum Aceh. Kepentingan terhadap aspirasi ini dominan ditampilkan dalam pelbagai jenis teks mulai editorial sebagai ruang pribadi (private space), berita, komentar pembaca, dan artikel opini sebagai ruang publik. Eksekusi teks yang demikian memperlihatkan indikasi rendahnya peran media sebagai ruang publik seperti akses publik nonelit yang minim, ketimpangan kedudukan publik dalam diskusi isu, strategi pemberitaan dengan pendekatan talking news, rendahnya keberlakuan obyektivitas pemberitaan, konstelasi sikap publik yang tidak berimbang, serta tendensi sikap media yang misleading. Semua rangkaian eksekusi teks tersebut memiliki motif baik ekonomi maupun khususnya yang terlihat jelas: kepentingan ideologis.

Perbincangan tentang konsepsi ruang publik patut didiskusikan kembali di era pers yang diasumsikan sudah tidak lagi menjadi bagian yang terkooptasi kekuasaan negara. Sebelumnya, instrumen yang memberdayakan pers, seperti kebebasan pers, belum didapatkan. Oleh karena itu, di satu sisi, pers dapat dimaklumi jika belum menempatkan diri sebagai ruang publik. Di sisi lain publik pun harus rela bahwa aspirasi mereka tidak terakomodasi karena minimnya kemerdekaan akses informasi dan berpendapat. Namun demikian, kondisi sekarang yang relatif terbebas dari kendali “invisible hand,” ternyata tidak otomatis memberdayakan publik seperti yang disyaratkan *civil society*.

*Artikel ini adalah ringkasan skripsi penulis. Penulis adalah lulusan program sarjana Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia.

Dalam diskursus media, wacana besar yang menyangkut kepentingan publik belum banyak melibatkan publik itu sendiri dalam proses penentuan kebijakan. Publik sering disuguhkan interpretasi tunggal tentang realitas dan mungkin juga solusi tunggal terhadap persoalan yang menyangkut kepentingan mereka. Faktor penjelasnya bisa berupa konstruksi dan penerjemahan ideologi, tetapi pragmatismenya juga bisa dilihat dari kaca mata pasar, atau apa yang disebut sebagai komodifikasi. Ini merupakan *entry point* pandangan ekonomi-politik Vincent Mosco (1996).

Realitas tersebut menunjukkan indikasi kuat bahwa kebebasan berpendapat masih dipahami sebagai hak media pers saja, belum melibatkan kebebasan publik. Intinya kita baru berbicara pada tahap pers yang bebas (*free press*), sementara kebebasan pers (*freedom of the press*) lebih luas cakupannya, menyangkut landasan legal dan etis tentang *share value* berkaitan dengan hak-hak sipil dalam membentuk dan menyatakan pendapat.

Dengan demikian basis kehidupan masyarakat dalam ruang publik adalah ketersediaan informasi tentang fakta publik yang benar dan objektif sehingga masyarakat dapat membentuk pendapat secara rasional guna terlibat dalam *sharing* kehidupan publik. Untuk itu ruang publik haruslah menjadi zona netral dan bebas yang di dalamnya berlangsung dinamika kehidupan warga secara personal yang terbebas dari kekuasaan negara, pasar dan kolektivisme (komunalisme).

Kenyataannya, praktik ruang publik dalam pers Indonesia masih rendah dan semakin terasa jika kita mencermati realitas intermedia, terutama televisi. Program televisi sekarang ini dibombardir ragam tayangan yang sesungguhnya tidak penting bagi mayoritas publik, apalagi mencerdaskan publik. Tanyangan *reality show* misalnya, adalah wujud memprivatisasikan ruang publik, yaitu hal-hal yang sifatnya personal "dipaksa" dijadikan sebagai konsumsi publik.

Wacana konflik merupakan wacana yang sarat dengan kepentingan publik, namun konstruksi teks media bisa saja menampilkan realitas tunggal dengan penonjolan perspektif tertentu. Konsekuensinya diskusi suatu isu tidak berlangsung secara rasional dan proporsional, bahkan media seringkali membuat *misleading opinion* menurut kepentingan ideologi mereka.

Oleh sebab itu, penting untuk tidak memandang media sebagai representasi realitas yang sesungguhnya. Paradigma aliran kritis menyebutkan bahwa posisi media dan wartawan tidak otonom dalam keseluruhan struktur sosial dan kekuatan sosial. Berita bukan lagi

pencerminan realitas yang sesungguhnya, melainkan suatu mekanisme dan ideologi yang dapat dibedah secara logis dan ilmiah (Eriyanto, 2001:31-32). Penelitian ini memfokuskan permasalahan pada sejauh mana *Media Indonesia* sudah menjadikan dirinya sebagai ruang publik.

■ KERANGKA TEORI

≡ **Konsepsi Ruang Publik Habermas**

Secara sederhana “ruang publik” yang merupakan terjemahan “*public sphere*” dapat dipahami sebagai ruang yang terletak di antara komunitas ekonomi dan negara tempat publik melakukan diskusi yang rasional, membentuk opini mereka, serta menjalankan pengawasan terhadap pemerintah (Habermas, 1993; lihat juga Calhoun, 1992). Kebebasan berbicara adalah syarat utama bagi komunikasi umum dan diskursus tingkat tinggi. Walau sulit dilakukan, Habermas mengemukakan tiga prinsip utama bagi ruang publik. Pertama, akses yang mudah terhadap informasi. Kedua, tidak ada perlakuan istimewa (*privilege*) terhadap peserta diskusi. Ketiga, peserta mengemukakan alasan rasional dalam berdiskusi dalam mencari konsensus (Roper dalam Toulouse, 1998: 70).

Usaha mencari norma bersama tersebut dilakukan dengan partisipasi bebas dalam diskusi. Ruang publik memberikan kesempatan untuk menyebarkan informasi dan mendebat informasi yang disampaikan. Ruang publik memberikan kesempatan agar masyarakat tidak pasif terhadap informasi yang mereka terima. Selain itu masyarakat diberi kesempatan berinteraksi langsung dengan anggota masyarakat lain dan, yang lebih penting, berinteraksi dengan penyebar informasi. Tingkat partisipasi seperti ini tidak terjadi pada komunikasi masa linier (Roper dalam Toulouse: 1998).

Kekuatan konsep ruang publik terkait dengan pengertian pelayanan publik yang bersifat universal, yaitu lingkup struktur keputusan politik atau kekuasaan harus dapat dikontrol. Ini biasanya berada dalam batasan negara-negara (*the nation state*) yang kemudian kewarganegaraan mereka didefinisikan dalam terminologi hak dan kewajiban universal secara nasional—adanya hak berpartisipasi dalam pembuatan keputusan.

Habermas mengatakan dalam bukunya, *The Structural Transformation of The Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*, bahwa ruang publik atau tepatnya ruang publik kaum borjuis, berkembang menjadi ciri masyarakat kapitalis Inggris abad

ke-18. Para pemilik modal berhasil memperkuat diri agar bebas dari pengaruh gereja dan negara. Habermas menyebutkan bahwa perbincangan berubah menjadi kritik dan *born mots* (kata-kata manis) berubah menjadi argumentasi.

Ruang publik pada pertengahan abad ke-19 mempunyai ciri-ciri adanya penyampaian analisis kritis, penyampaian laporan lengkap, kemudahan akses, dan independensi partisipan dari kepentingan ekonomi maupun negara. Semua itu diungkapkan dalam suasana debat terbuka. Ruang publik baru akan berfungsi secara efektif bila informasi yang dikemukakan di dalamnya adalah informasi berkualitas serta mudah didapat. Informasi yang dapat diandalkan (*reliable*) dan cukup bagi sebuah perdebatan publik akan mendukung terbentuknya diskusi yang berkualitas. Sedangkan informasi yang buruk akan menghasilkan perdebatan buruk yang mengakibatkan konsensus publik buruk pula.

Namun konsepsi Habermas itu sendiri juga mengundang kritik. Pertama, ia dituduh terlalu mengidealisasikan sosok kaum borjuis dan mengabaikan perkembangan paralel dan posisi ruang publik yang muncul dari kelas pekerja. Habermas juga dituduh menutup mata terhadap isu gender dan patriarki, menyebarkan model komunikasi manusia yang terlalu abstrak dan rasionalis, serta melebih-lebihkan potensi manipulasi media massa terhadap khalayak yang pasif dan mudah dipengaruhi.

Kedua, meskipun partisipasi khalayak dalam debat publik hanya sebagai penonton—dengan hanya membaca surat kabar atau mendengarkan radio atau menonton televisi sehingga jauh dari konsep ideal demokrasi partisipatori—bukan berarti keterlibatan politik juga memudar.

Scannell (1992) dan Tolson (1991) berargumen bahwa ruang publik melalui media berevolusi, bukan begitu saja menghilang. Cardiff (1980) dan Scannell (1992) menelusuri evolusi dalam dunia penyiaran dari budaya komunikasi berdasarkan institusionalisasi praktik perbincangan dalam ruang pribadi. Tolson sebaliknya melihat ruang publik dengan kontradiksi dalam media yang terdapat tawar-menawar antara permintaan akan informasi dan hiburan. Ia membandingkan ruang publik awal sebagai paternalis dan ruang publik yang sekarang sebagai populis (Fairclough, 1995: 44).

Namun bagaimanapun, konsepsi Habermas sebagai sebuah bentuk ideal harus tetap menjadi rujukan dan panduan untuk mengevaluasi sejauh mana media telah menjadikan diri mereka sebagai ruang publik yang mempraktikkan *freedom of the press* bukan hanya *free press*.

■ METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kritis dengan metode analisis isi kualitatif. Penekanan metode ini adalah sifat holistik. Oleh karena itu, tolak ukur kualitas penelitian analisis wacana kritis mempunyai dua kriteria. Pertama, sifat holistik, yaitu kemampuan menempatkan teks dalam konteksnya yang utuh melalui pertautan antara analisis pada jenjang teks dengan analisis terhadap konteks. Kedua, sifat historis, yaitu kemampuan mendefinisikan secara spesifik *historical situatedness* analisis yang dilakukannya dengan mengaitkannya dengan tahap perkembangan historis.

Dengan demikian, sangat beralasan jika penulis kemudian menggunakan metode yang dikembangkan Norman Fairclough. Wacana Fairclough memiliki level analisis yang komprehensif terhadap obyek penelitian, yaitu level teks, *discourse practice* dan *sociocultural practice*. Latar belakang sosiologis konstruksi teks *Media Indonesia* terhadap konflik Aceh memungkinkan dijelaskan dengan analisis Fairclough ini. Pertanyaan besar analisis wacana Fairclough adalah bagaimana menghubungkan teks yang mikro dengan konteks masyarakat yang makro. Di sini bahasa menjadi alat penting karena bahasa dilihat sebagai praktik kekuasaan. Model ini disebut juga model perubahan sosial karena bahasa bukan saja praktik individu tetapi merefleksikan sesuatu (fakta sosial).

Fairclough (Eriyanto, 2001: 289) sendiri mengamati teks terhadap tiga hal berikut:

Unsur	Yang Ingin Dilihat
Representasi	Bagaimana peristiwa, orang, kelompok, situasi, keadaan, atau apapun ditampilkan serta digambarkan dalam teks.
Relasi	Bagaimana hubungan antara wartawan, khalayak, dan partisipan berita ditampilkan serta digambarkan dalam teks.
Identitas	Bagaimana identitas wartawan, khalayak, dan partisipan berita ditampilkan, serta digambarkan dalam teks.

Adapun obyek observasi dalam penelitian ini termasuk dalam *genre* berita, di samping disertakan editorial, komentar pembaca dan tulisan opini. Unit analisisnya keseluruhan teks tentang referendum Aceh, dari edisi 5 Januari 1999 hingga 9 Desember 1999. Selama periode ini terdapat 10 tulisan editorial, 40 berita, 10

komentar pembaca dan 4 artikel opini. Periode itu dipilih karena pada saat itu muncul kebebasan pers dan dinamika dalam konflik Aceh: mulai pascapencabutan DOM (Daerah Operasi Militer) sampai ide otonomi luas, referendum selain melemahnya kekuatan pemerintahan dan bangkitnya kekuatan sipil bersenjata, serta wacana kemerdekaan.

■ KERANGKA ANALISIS

Kerangka analisis ditempuh dalam tiga tahap, yaitu deskripsi teks dengan memperhatikan aspek isi dan bahasa yang digunakan *Media Indonesia* dan cara penyampaian (*style*) suatu isu/peristiwa. Kedua, interpretasi, yakni menafsirkan teks dengan praktik wacana yang dilakukan. Terakhir eksplanasi, yaitu mencari penjelasan atas hasil penafsiran pada tahap kedua dengan jalan menghubungkan produksi teks dengan praktik *sociocultural* tempat teks berada.

Pada setiap level analisis, ditempuh metode yang berbeda-beda, yaitu:

Jenjang Analisis	Metode
Teks	<i>Framing</i> Gamson dan Modigliani.
<i>Discourse practice/news room</i>	Wawancara mendalam dengan redaksi.
Sociocultural	<i>Studi pustaka, penelusuran historis.</i>

Pada analisis di level teks, penelitian ini menggunakan pembingkai-an Gomson & Modigliani, yaitu

<i>Framing Devices</i>	Penjelasan
<i>Metaphors</i>	menunjuk pada perumpamaan atau pengandaian.
<i>Exemplars</i>	mengaitkan bingkai dengan contoh, teori atau pengalaman pada masa lampau.
<i>Cataphrases</i>	merupakan slogan-slogan yang "harus" dikerjakan, berupa frase dengan konotasi tertentu sehingga terlihat menarik, menonjol atau kontras.
<i>Depictions</i>	merujuk pada keadaan bertentangan. Penggambaran fakta dengan memakai kata, istilah, kalimat konotatif yang menuju ke citra tertentu.

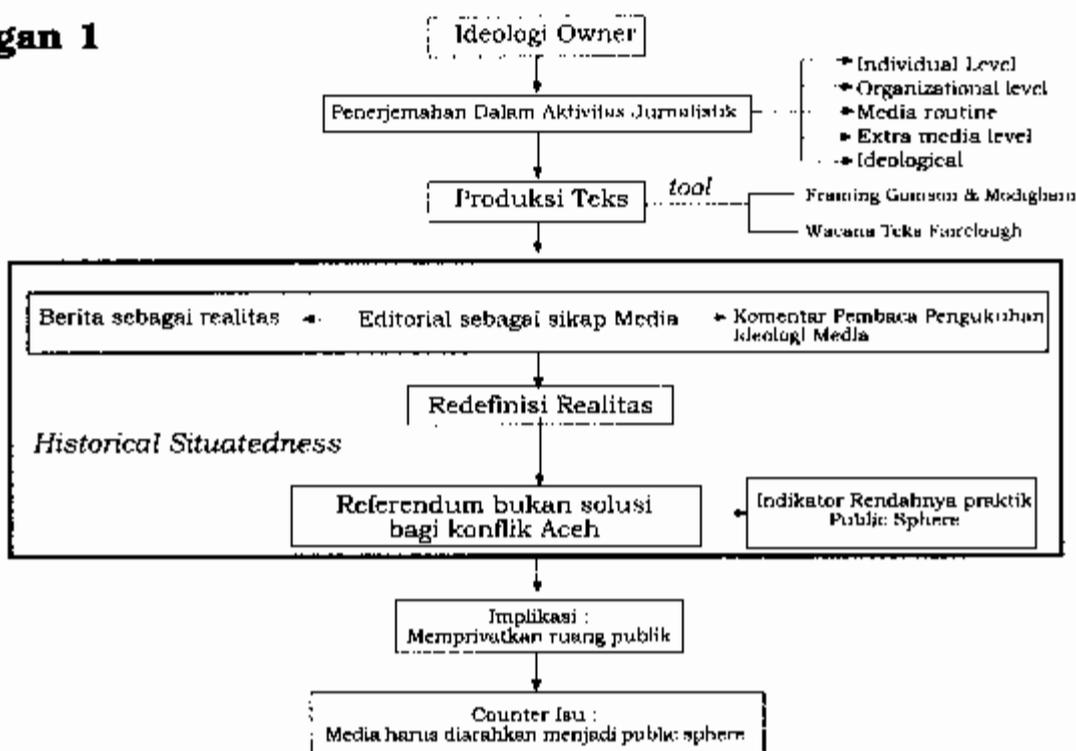
<i>Visual images</i>	yaitu gambar-gambar yang mendukung bingkai secara keseluruhan.
<i>Euphemism</i>	Penghalusan makna

Reasoning Devices	Penjelasan
<i>Roots</i>	memperlihatkan hubungan sebab akibat. Bertujuan membenarkan fakta berdasar hubungan sebab akibat yang digambarkan.
<i>Appeals to principles</i>	yang merupakan premis atau klaim moral sebagai argumentasi pembener membangun cerita.
<i>Consequences</i>	merupakan kesimpulan logika penalaran

TEMUAN

Berikut akan disajikan temuan penelitian secara keseluruhan. Bagan 1 akan memperlihatkan pemetaan masalah dan alur analisis temuan. Berikutnya berturut-turut disajikan tabel temuan pada level teks dengan analisis pembedaan dan elemen teks Norman Fairclough. Terakhir adalah temuan tentang bagaimana *Media Indonesia* menyajikan teks dengan wacana referendum. Selanjutnya penulis akan menyertakan beberapa poin besar diskusi dari temuan pada level teks, *discourse practice* dan *sociocultural practice*.

Bagan 1



Sementara itu temuan tiap kategori teks secara keseluruhan dapat dipaparkan sebagai berikut.

Tabel 1
Framing Devices Editorial

Framing Devices	Temuan
<i>Metaphors</i>	Romantisme sejarah Aceh sebagai pejuang kemerdekaan.
<i>Cataphrases</i>	Deskripsi konflik yang memburuk dan moral <i>force</i> berupa kritikan ke pemerintah.
<i>Exemplar</i>	Peristiwa penting yang dramatis.
<i>Depiction</i>	Pemerintah yang tidak memiliki <i>sense of crisis</i> .

Tabel 2
Reasoning Devices Editorial

Framing Devices	Temuan
<i>Roots</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Aceh adalah aset bangsa. • Tuntutan masyarakat Aceh adalah keadilan. • Pemerintah tidak punya visi solusi konflik.
<i>Appeals to principle</i>	Aceh yang ditelantarkan dan rendahnya <i>sense of crisis</i> pemerintah dalam mencari resolusi konflik.
<i>Consequences</i>	Pengelasan bahwa Aceh harus dikembalikan keadilannya. Aceh adalah barometer integrasi.

Tabel 3
Elemen Teks Editorial

Elemen Teks	Temuan
Representasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah sebagai pencari solusi yang gamang. • Rakyat aceh sebagai korban konflik, berwatak pemberontak yang sulit diredam.

Relasi	<ul style="list-style-type: none"> • Melihat masalah Aceh sebagai evaluasi bagi kinerja pemerintah • Adanya kekuatan baru yang muncul melalui ide referendum.
Identitas	Nasionalis.

Tabel 4
Framing Devices Berita

Framing Devices	Frame Nasionalisme	Proreferendum
<i>Metaphors</i>	Romantisme sejarah Aceh.	Gugatan terhadap kelompok nasionalis.
<i>Cataphrases</i>	Meredam diskusi referendum sebagai sebuah instrumen demokratis.	Akses informasi dan ekspose peristiwa.
<i>Exemplar</i>	Kerugian dan kesulitan mekanisme pelaksanaan.	Mismanajemen pemerintah dan runtuh simbol Indonesia.
<i>Depiction</i>	Referendum sama dengan separatis.	Tidak ada.

Tabel 5
Reasoning Devices Berita

Framing Devices	Frame Nasionalisme	Frame Nasionalisme
<i>Roots</i>	Kerugian terhadap kesatuan RI dan <i>survival</i> Aceh.	Tidak ada yang menonjol.
<i>Appeals to principle</i>	Persuasi dan menumbuhkan rasa bangga terhadap republik.	Peran SIRA dan perempuan Aceh.
<i>Consequences</i>	Sikap kooperatif pemerintah dan masyarakat Aceh.	Solusi <i>prosperity</i> .

Tabel 6
Elemen Teks Berita

Elemen Teks	Temuan	
	Nasionalisme	Pro referendum
Representasi	<i>Prosperity solution</i> bagi Aceh	Referendum sudah menjadi kehendak kolektif yang aktual.
Relasi	<ul style="list-style-type: none"> • Simpati terhadap masyarakat Aceh. • Konflik Aceh jangan dibuat rumit, masih ada harapan 	Seolah mendukung referendum, tetapi itu strategi memperlihatkan sisi buruk referendum.
Identitas	Nasionalis	Nasionalis

Tabel 7
Indikator Ruang Publik pada Teks

Indikator Praktik Ruang Publik	Temuan
Akses Publik	Sumber elit dominan.
Persamaan Kedudukan Publik	Timpang antara elit dengan publik nonelit.
Strategi Pemberitaan	<i>Talking news</i> ; dengan sumber elit.
Konsep obyektivitas	Keberlakuan obyektivitas dalam pewacanaan referendum minim.
Diskusi isu dan konstalasi sikap publik	<ul style="list-style-type: none"> • Cenderung tidak kritis • Argumen yang <i>taken for granted</i> (kesatuan). • Pendapat publik no elit minim ekspose..
Perspektif dominan	Nasionalisme, bahwa Aceh adalah bagian tak terpisahkan dari RI.
Tendensi sikap	Referendum bukan solusi yang baik dengan memperlihatkan konsistensi di berbagai jenis teks.

Tabel 8
Discourse Practice

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Isi Media	Temuan
<i>Individual level</i>	Cenderung seragam melalui standarisasi profesional.
<i>Media routine</i>	Ketergantungan sumber elit dan perspektif elit.
<i>Organizational level</i>	Hirarkis tanggungjawab; eksekutif memiliki keputusan akhir, tapi pemilik memiliki otoritas pemberitaan.
<i>Extra media level</i>	Ada pasar yang luas untuk teks bingkai nasionalisme; penyadaran kolektif akan nasionalisme.
<i>Ideological level</i>	Kontrol melalui Proses interpelasi & menjalankannya melalui proses hegemonik.

Sementara itu cara *Media Indonesia* memberitakan wacana referendum Aceh dapat dipaparkan sebagai berikut.

Tabel 9
Kategori berita, Model Pemberitaan dan Cover Both Side

Jenis Representasi Publik	Kategori Pemberitaan		
	Nasionalisme	Proreferendum	Total
Pemerintah	10	4	14
TNI/ Polri	9	-	9
Partai Politik	2	-	2
Ekspone ABRI	2	-	2
DPRD I/II	1	2	3
DPR/MPR	10	6	16
Gubernur Aceh	-	1	1
Mahasiswa Aceh	-	3	3
Tokoh masyarakat Aceh	6	2	8
Ulama Aceh	-	1	1
SIRA	1	4	5
Publik Non Aceh	9	1	10
Pengamat Masalah Aceh	3	2	5
LSM Perempuan	-	1	1
Internasional/AS/ASEAN	1	-	1
Petinggi GAM/Hasan Tiro	-	1	1

Pengadilan/Kejaksaan Masyarakat Aceh LSM/Kontras	1 - 1	1 - 2	2 0 3
Jumlah	56	31	87

Model Pemberitaan	Frame Nasionalisme	Frame Referendum	Total
Talking News	21	12	23
Reportase	-	2	2
Lainnya	1	2	3

Cover Both Side Coverage	Berita Frame Nasionalisme	Berita Frame Proreferendum
Ada	8	8
Tidak ada	14	8
Jumlah	22	16

Tabel 10
Pemaknaan Referendum oleh Representasi Publik

No	Representasi Publik	Makna Referendum
1.	1. Gus Dur 2. Mahasiswa 3. Tim Penasehat Aceh 4. Berapa tokoh Aceh 5. SIRA 6. Gubernur Aceh 7. LSM/KONTRAS	1. Hak penentuan nasib. 2. Ekspresi kekecewaan terhadap pemerintah. 3. Jalan damai bagi solusi Aceh. 4. Kehendak mayoritas masyarakat Aceh.
2.	1. Rektor Unsyiah 2. TNI 3. Partai 4. DPR 5. Eksponen 45 6. Publik umum non-Aceh 7. Pengamat/penulis artikel	1. Merugikan Aceh 2. Membahayakan dan Menghancurkan Keutuhan wilayah Indonesia.
3.	1. GAM	Merdeka
4	1. Ulama 2. Pengadilan/Kejaksaan 3. Perempuan 4. Internasional/ASEAN/AS 5. Masyarakat Aceh	Tidak Jelas

Tabel 11
Materi Opsi Referendum

No.	Representasi Publik	Opsi Referendum
1.	Gus Dur	1. Otonomi total, tapi bukan federalisme. Aceh bisa mengurus diri sendiri. 2. Pembagian pendapatan 25% untuk pusat, 75% bagi daerah. 3. Status provinsi khusus yang memberikan toleransi untuk melarang perjudian dan pelacuran di wilayahnya.
2.	Gubernur Aceh dan SIRA	1. Otonomi luas. 2. Merdeka.

Tabel 12
Mekanisme Persiapan dan Pelaksanaan referendum

No.	Representasi Publik	Pemikiran Mekanisme Referendum
1.	Gus Dur/Pemerintah	1. Harus terlebih dahulu mengetahui keinginan rakyat Aceh yang sedang dikembangkan caranya oleh pemerintah 2. Opsinya tidak boleh ada merdeka, terserah orang Aceh terima atau tidak.
2.	Akbar Tandjung/DPR	1. Referendum dalam konstitusi Indonesia adalah hak DPR/MPR, jadi presiden tidak punya hak untuk menerima dan menolak. 2. Para anggota DPR menggarisbawahi bahwa dalam GBHN Aceh telah ditetapkan sebagai wilayah Indonesia. Mereka justru menganjurkan Gus Dur lebih mengintensifkan dialog dengan masyarakat Aceh.
3.	Bachtiar Aly/Tokoh Aceh	1. Referendum harus terlebih dahulu menentukan pemimpin Aceh yang dipilih secara langsung untuk berdialog dengan pemerintah. 2. Pemimpin inilah yang bisa mewakili aspirasi rakyat Aceh untuk menentukan opsi apa yang terbaik dalam referendum.

Tabel 13
Solusi Alternatif Konflik Aceh Selain Referendum

No.	Representasi Publik	Solusi Alternatif
1	Surya Paloh	Dekrit Presiden dengan isi: 1. Mempertahankan Aceh tetap di NKRI. 2. Membentuk pemerintahan <i>caretaker</i> . 3. Otonomi khusus. 4. Mengadili pelanggaran HAM di Aceh baik militer atau sipil.
2	Abdullah Puteh/ tokoh pemuda Aceh	Federasi plus, yaitu meliputi: 1. Kebebasan Aceh memegang kebijakan moneter dan fiskal, agama, dan peradilan berdasarkan hukum Islam. 2. Pemerintah pusat menaggani masalah keamanan dan pertahanan serta politik luar negeri.
3	Menteri Negara Ryaas Rasyid	Otonomi seluas-luasnya yang terbaik bagi rakyat Aceh. Pilihan ini akan segera direalisasikan pemerintah pusat melalui UU No.22/1999 tentang otonomi daerah dan UU No. 25/1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah dengan bagi hasil 72 : 25 untuk daerah dan pusat. Sebab, otonomi sebenarnya adalah masalah teknis administrasi pemerintahan. Nah ancaman terhadap disintegrasi itu akan terjadi sepanjang adanya kekecewaan, ketidakadilan dan tidak adanya kesetaraan. Maka jika ada <i>political will</i> pemerintah menyerahkan apa saja sepanjang tidak menyangkut hal prinsipil akan lebih bagus. Hal senada juga disampaikan oleh Andi Mallarangeng.
4	Rektor Unsyiah	Aceh memerlukan otonomi dengan fokus pada perimbangan keuangan daerah dan keistimewaan dalam hal pendidikan, agama dan adat. Perimbangan keuangan bukan hanya dari hasil alam, tetapi juga dari pajak dan retribusi.
5	Pengamat Sosial Politik	Negara federasi lebih baik daripada NKRI tercabik-cabik. Aspirasi ini didasarkan atas kenyataan bahwa UU yang ada selama ini belum mengakomodasi keinginan daerah dan porsi daerah yang seharusnya diterima. Dari pembagaian pendapatan dari hasil migas, perolehan daerah masih sangat sedikit, hanya 15%.

/// Discourse Practise

Pengaruh Ideologi Sang Pemilik

Surya Paloh sangat mencuat dengan ideologi nasionalismenya dalam mencermati konflik Aceh. Jargon yang terkenal adalah bahwa konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah final. Oleh sebab itu, tidak boleh ada usaha-usaha yang menghancurkan konsep ini apapun persoalannya, oleh siapapun dan untuk tujuan apapun. Dalam pandangannya, negara ini dengan susah payah dibangun para *founding fathers* dan generasi berikutnya diharapkan menjaga keutuhannya, bukan justru merusaknya.

Paradigma Surya ini sendiri dapat dipahami dalam beberapa penjas. ¹ Pertama, latar belakang Surya Paloh yang ayahnya seorang kepala polisi dan senantiasa mendidiknya dengan wawasan kebangsaan dan memunculkan sikap nasionalis. Sementara itu keterlibatannya dalam organisasi kepemudaan seperti KNPI dan Persatuan Putra-putri ABRI, serta organisasi lainnya juga berkaitan dengan semangat nasionalisme itu.

Kedua, dalam konteks konflik Aceh, meskipun ia tokoh Aceh, namun Surya tidak memiliki kedekatan emosional dan psikologis dengan Aceh sebagai sebuah daerah dan masyarakatnya karena sebagian besar kehidupannya dilalui di luar Aceh. Hal ini diakuinya sendiri bahwa ia sangat antisovinisme (*chauvinisme*) sedangkan konflik Aceh dalam perkembangannya ia nilai lebih mengarah ke sikap sovinnisme itu.

Ketiga, Surya Paloh sesungguhnya lebih dikenal *track recordnya* sebagai pengusaha daripada politisi. Artinya, sebagian besar kehidupannya ia dedikasikan untuk kepentingan bisnis. Hal ini mungkin membawa implikasi bahwa mendukung gerakan-gerakan atau menjadi bagian perjuangan yang membebaskan Aceh dari Indonesia adalah sikap bodoh yang dalam banyak hal justru merugikan bisnis yang ia dijalankan dalam wilayah Indonesia.

Keempat adalah analisis intertekstualitas dengan melihat teks pada konteks (ideologi Surya) dan realitas teks pada konteks sekarang, yaitu bahwa Surya Paloh terjun dalam kancah politik dengan orientasi kekuasaan dengan ikut dalam konvensi partai Golkar sebagai salah satu calon presiden.

Dalam realitas demikian, Surya membangun citra diri melalui instrumen demokrasi, yaitu pers, bahwa dirinya dalah figur yang memiliki *sense of crisis* terhadap persoalan bangsa, bertanggung jawab dan taat asas dengan ide-ide penyelamatan bangsa. Gagasan

seperti itu dalam banyak hal memenuhi harapan publik yang skeptis terhadap kondisi bangsa. Dengan demikian, tidak ada hal yang terpungkiri bahwa Surya sangat cinta dengan keindonesiaan (meskipun politis) sehingga ia berkompetisi untuk kursi kepresidenan. Mungkin juga perhitungan ekonomi yang juga akan menguntungkan. Satu hal yang jelas adalah ideologi nasionalisme ini secara taat asas diperlihatkannya meskipun dalam tiap konteks terdapat motif yang politis atau justru murni adanya.

Penerjemahan Ideologi Dalam Rutinintas Media

Para eksekutif redaksi sangat taat asas memperlihatkan perspektif nasionalisme dalam konstruksi teks. Kleden Suban, asisten redaktur eksekutif *Media Indonesia* mengatakan bahwa *guideline* pemberitaan konflik yang bermuatan separatisme dan berpotensi distegrasi sangat jelas. Ia menyebutkan, "Bagi kami, negara kesatuan sudah selesai. Ini berkaitan dengan kebijakan pemimpin umum, Pak Surya Paloh. Jadi, toleransi terhadap separatisme kami minimalisasi. Bahwa ada kejadiannya tidak jadi soal, tetapi untuk mengembangkannya lagi kami minimalisasi."

Adapun rendahnya keterlibatan publik nonelit dalam pemberitaan, Kleden menanggapi, "Di daerah yang menghembus isu 'kan juga elit. Di Jakarta juga sama. Mereka berkaitan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah. Tapi karena kebijakan kami tidak ingin mengembangkan isu itu, kami tidak ingin lagi mengembangkannya di lapisan bawah." Bagi *Media Indonesia*, hal itu merupakan karakter serta sikap yang tegas dan lugas sebagai ciri khasnya. Dalam pandangan *Media Indonesia*, persoalan utama Aceh adalah ketidakadilan sehingga solusi referendum sangatlah beresiko. Kleden menegaskan, "Dalam soal arah pemberitaan yang menimbulkan disintegrasi, sudahlah, kami tidak usah ikut meramaikan."

Seperti diakui Kleden bahwa editorial adalah roh pemberitaan *Media Indonesia*, Lauren Tato, Wakil Pemimpin Redaksi yang juga tim editorial menjelaskan pentingnya peran editorial. "Media harus berfungsi sebagai tempat berlangsungnya diskusi terhadap isu-isu publik. Meskipun demikian di sisi lain, sebagai sebuah institusi atau organisasi, kami juga harus ada ruang 'bersubjektif ria,' namun tentu tetap didasarkan pada fakta dan analisis."

Ia juga menambahkan, "Kami bukan ahli dalam membedah isu-isu sosial yang sedang bergulir di masyarakat. Tapi apa yang kami tawarkan adalah akal sehat, kami ingin menunjukkan kepada publik,

ini lho persoalannya, Mari kita renungkan kembali, bukan menelantarkan, mempolitisasi, apalagi memperumit persoalan. Ada semacam tanggung jawab moral untuk mengurai masalah di masyarakat dengan memunculkan sikap yang tegas dan lugas sebagai sebuah pemikiran.”

Media Indonesia mencermati kebebasan atmosfer politik telah melunturkan nilai-nilai kesatuan dan konflik Aceh adalah momentum yang memanfaatkan kebebasan itu. Lauren mengungkapkan, “Sekarang ‘kan kita memiliki investasi terhadap sistem dan itu cost-nya sangat mahal. Pertanyaan saya, di mana buruknya negara kesatuan? Penyelenggaraannya ‘kan? Ya sudah, itu saja yang diperbaiki. Jika itu dibenahi, saya kira 5-10 tahun ke depan pertanyaan kemerdekaan atau apakah itu sudah tidak relevan lagi.”

Oleh sebab itu, *Media Indonesia* tidak sepakat bahwa konstruksi teksnya meredam referendum sebagai instrumen demokratis. “Demokrasi ‘kan dasarnya adalah ada *benefit*. Kalau hanya demi demokrasi kita bisa memilih dengan bebas, dalam wacana sih oke. Tapi jika pilihan itu berbahaya, buat apa. Oleh karena itu menurut kami, tidak boleh ada satu bagian pun di negara ini yang diberi peluang, apalagi dipaksa keluar dari NKRI. Maka pilihan yang bagus menurut demokrasi itu bisa jadi pilihan yang salah. Jadi, *frame-nya* tetap NKRI.”

Lauren juga membantah tuduhan kalau *Media Indonesia* terlalu menyanjung Aceh dalam konstruksi teksnya karena faktor kekayaan alamnya. Bagi *Media Indonesia*, kondisi sekarang adalah titik rawan menuju kehancuran. “Kita berbangsa ada proses sejarah ‘kan. Ternyata Aceh ada tanggung jawab yang besar sekali dalam kontribusi terhadap Republik. Lalu dalam analisis kami, kalau dulu bisa, kenapa sekarang tidak. Lalu yang kami pertanyakan, apakah tidak ada *local power* yang mendorong agar negara kesatuan tetap harus mendapatkan prioritas diselamatkan. Pasti ada itu,” tegas Lauren.

Dengan demikian, sangat tegas bahwa kebijakan *Media Indonesia* adalah tidak mendukung referendum sebagai solusi. Terlihat bahwa *Media Indonesia* mencoba menggugah publik lewat teks editorial, menampilkan fakta melalui pemberitaan dan memperkuatnya dengan dukungan publik melalui opini pembaca.

“No, kami tidak memberikan tempat untuk orang-orang yang memprovokasi disintegrasi.” Kalau *you* menyerahkan semuanya kepada kehendak publik, itu artinya koran *you* tidak mempunyai watak. Itu sudah menjadi visi dan misi kami. Itu secara sadar kami tempuh,” tegas Lauren.

■ **Penjelas *Historical Situatedness***

Arus Globalisasi dan Kebebasan terhadap Konstruksi Teks

Globalisasi secara umum telah menransfer nilai-nilai perubahan yang berujung pada penghancuran nilai-nilai kediktatoran, tuntutan akan kebebasan berpendapat, berekspresi, transparansi politik dan ekonomi, serta kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat, dan penolakan terhadap usaha memapankan struktur ekonomi dan politik yang berbasis pada kaum elit. Perubahan inilah yang menjadi langkah awal "pergeseran" wujud konstruksi teks media dan kebebasan akan informasi, tepatnya kebebasan menjalankan bisnis pers serta kebebasan bagi institusi pers dan awak pers itu sendiri.

Hal ini juga sejalan dengan apa yang disebut Klapp dalam Dan Nimmo (1998) sebagai usaha pembalikan kepemimpinan simbolik. Selama masa Orde Baru media pers cenderung menjadi pelayan terhadap realitas yang diinginkan penguasa terhadap publik. Media sungguh tidak mampu menjadi suatu entitas otonom yang "melayani" publik, bukan atas dasar keinginan penguasa. Meskipun mereka diyakini tidak sepakat dengan penguasa, pelbagai aturan dan struktur pers membelenggu media. Jikapun ada kalangan media berani menantang arus, mereka secara politis dikalahkan dan secara ekonomi juga harus merugi lewat pembredelan.

Sementara itu di saat yang bersamaan, lembaga-lembaga yang memiliki peran signifikan mengontrol kekuasaan seperti Departemen Perwakilan Rakyat (DPR), MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), MA (Mahkamah Agung), Peradilan, bahkan LSM juga tenggelam. Bahkan mereka menjadi perpanjangan tangan kepemimpinan simbolik sebuah figur, dalam hal ini Soeharto. Kepemimpinan simbolik Soeharto terlalu 'sakral' untuk dikritik dan terlalu kuat untuk dikalahkan, apalagi dengan cara-cara perang wacana dengan perspektif *civilian*. Akibatnya tidak ada pemimpin organisasi yang eksis dan menjadi lawan sesungguhnya terhadap kepemimpinan simbolik ini. Seluruh struktur kehidupan, kepemimpinan simbolik tersebut sudah mengakar dan dipraktikan dengan mapan.

Media sebagai sebuah organisasi memiliki kepentingan mempertegas ideologi mereka kepada publik. Apa yang dilakukan *Media Indonesia* dengan ideologi Surya Paloh dalam pemberitaan konflik Aceh dapat dilihat dari beberapa penjelas berikut. Pertama, ia adalah realitas kemandirian suatu ideologi yang sangat dimungkinkan lantaran minimnya kontrol pemerintah terhadap institusi pers. Artinya, cara dan isi kritikan (*the way and critical content*) terhadap pemerintah, khususnya kebijakan terhadap

konflik, dilihat sebagai sesuatu yang seharusnya dalam era yang bebas tersebut.

Kedua, realitas simbolik suatu isu seperti redefinisi referendum, yaitu referendum adalah kemerdekaan bagi Aceh, mengarahkan media untuk melihat realitas simbolik ini sebagai realitas tunggal. Media berpihak kepada publik dominan yang menghendaki solusi yang konstruktif atas isu referendum yang oleh publik Indonesia dilihat sebagai ancaman akibat realitas simbolik tadi. Padahal realitas tersebut adalah bias media karena mengabaikan isu dan realitas lain di level akar rumput (tindakan GAM yang merusak makna referendum dan masyarakat bawah yang terprovokasi GAM), sehingga wacana referendum menjadi realitas kehendak kemerdekaan.

Dalam konteks demikian, media pada umumnya, dan *Media Indonesia* pada khususnya melihat peristiwa atau isu dominan sebagai sebuah *news value*. Didukung kebijakan pemberitaan konflik bahwa *guideline*-nya adalah NKRI sebagai konsep final, pemunculan bingkai nasionalisme seperti pada penjelasan *extra media level* akan mendapat tempat di publik pembaca.

Apa yang tecermati disini adalah nasionalisme sebagai sebuah kepentingan ideologis menjadi semangat komunal yang digugah kembali, dipersuasikan dan diperjuangkan. Hal ini menjadi sejalan dengan era kebebasan yang memunculkan banyak tafsir ulang terhadap berbagai terminologi kebangsaan, salah satunya nasionalisme. Nasionalisme dalam hal ini dilihat dari dua sisi. Pertama, pengertian tekstualnya berupa keutuhan kedaulatan. Kedua, pengertian kontekstual berupa kemakmuran rakyat.

Permasalahannya adalah media telah mendefinisikan dan menciptakan realitas baru dengan implikasi buruk terhadap isu referendum. Lantaran *Media Indonesia* lebih terpaku dengan realitas simbolik berupa menguatnya aspirasi kemerdekaan di Aceh, muncul realitas baru bahwa Aceh sudah hampir tidak ada harapan bergabung dengan Indonesia. Oleh karena itu, realitas ini harus ditempatkan sebagai ancaman integrasi dan kritikan kepada pemerintah yang tidak sigap menghadapi perkembangan konflik.

Redefini referendum ini menyebabkan kemarahan TNI (Tentara Nasional Indonesia) terhadap masyarakat Aceh pada umumnya. TNI yang emosional menyebarkan intel untuk memata-matai aktivitas masyarakat, GAM dan simpatisannya. Tidak jarang, TNI bertindak di luar kontrol sehingga berimplikasi pada intimidasi seperti razia, interogasi, penahanan, dan penghilangan dengan

tindakan kekerasan yang diperlihatkan sebagai "psy-war" terhadap kekuatan GAM. Tindakan ini meningkatkan eskalasi kebencian terhadap TNI dan segala representasi negara Indonesia. Situasi inilah yang menyebabkan referendum menjadi situasi yang setengah matang di satu sisi, di sisi lain dibelokkan maknanya oleh GAM yang merespon secara emosional oleh instrumen negara dengan mengulang kekerasan. Padahal situasi seharusnya menuntut TNI memperbaiki citranya pasca-DOM.

Maka referendum menjadi wacana yang dinilai secara politis sebagai sarana mencari celah menuju Aceh merdeka. Padahal faktanya adalah sedang berlangsung pertarungan kekuasaan antarkelompok atau antarelit dengan masyarakat awam sebagai sasaran kepentingan kekuasaan mereka. Sayangnya kelompok GAM lebih mampu memanfaatkan momentum. Eksistensi mereka didukung ekspose media sehingga memungkinkan publik Aceh merasa dekat, menerima, dan menaruh harapan kepada mereka. Keberpihakan ini menguat ketika pemerintah salah langkah dalam mengantisipasi momentum tersebut.

■ Harapan terhadap Media Pers

Penelitian ini membuktikan bahwa peran media sebagai ruang publik dalam pengertian *intra media* masih minim. Namun demikian, penelitian pendukung sebelumnya juga memperlihatkan kelemahan serupa dalam melihat media dari pengertian *inter media*. Praktik media pers masih sebatas menghasilkan konsep *free press*, belum menuju aplikasi *freedom of the press*. Jika konsep pertama lebih banyak membicarakan kebebasan institusi pers sebagai entitas otonom untuk menjalankan bisnis dan melayani publik dengan informasi versi orang-orang pers, *freedom of the press* menaruh perhatian lebih jauh berupa pelibatan unsur-unsur publik terhadap akses pers dan mendiskusikan pelbagai isu terkait dengan publik secara proporsional.

Akibatnya, kondisi ideal yang diharapkan Habermas bagi suatu ruang publik masih rendah. Ruang publik memberikan kesempatan menyebarkan informasi dan mendebat informasi agar masyarakat tidak pasif terhadap informasi yang mereka terima. Ternyata model komunikasi massa linier ini sering dipraktikkan pers pada awal-awal masa transisi, ketika kekuasaan pers sangat besar. Esensi sebenarnya kekuasaan pemerintah yang mendikte informasi pada masa sebelumnya sekarang digantikan pers.

Kenyataannya kebebasan pers dan keterbukaan tidak serta merta menghasilkan pertukaran informasi yang ideal seperti konsepsi Habermas. Buktinya, pemberitaan tentang wacana konflik, misalnya, masih elitis. Ini berarti porsi pemberitaan masih didominasi kekuasaan dan mengabaikan kepentingan publik bersuara.

Lebih ekstrimnya adalah, jika terhadap isu-isu seperti konflik yang memperlihatkan dampak secara langsung (kasat) saja media sudah tidak menjalankan fungsi ruang publiknya dengan baik, maka jauh lebih sulit lagi mengharap media menjalankan fungsi ruang publiknya terhadap isu-isu yang sebenarnya sangat berdampak kepada kehidupan publik—sedangkan isu itu sendiri hanya dikuasai oleh atau menjadi milik elit karena para elit ini terlibat langsung dalam kebijakan, dan pembuatan keputusannya.

Hal tersebut misalnya privatisasi BUMN, kebijakan moneter, atau bahkan contoh paling sederhana saat ini adalah perubahan sistem pemilu; sejauh mana masyarakat pada level bawah mengerti mekanisme pemilu 2004—apa itu pemilihan caleg, dan sebagainya—bisa dipastikan pengetahuan mereka minim. Apalagi memberikan peluang mendiskusikan nasib demokrasi, yang salah satu instrumennya adalah pemilu.

Jika benang merah ditarik ke level yang lebih makro, terdapat sejumlah indikasi yang memprihatinkan berkenaan dengan fungsi media sebagai ruang publik. Penulis menyebutnya sebagai “usaha-usaha untuk memprivatisasikan ruang publik atas motif ekonomi dan politik.” Fenomena ini menunjukkan pergeseran fungsi pers dari esensi sejatinya yang memperjuangkan kebebasan pers dan informasi.

Implikasi yang lebih besar atas penggunaan ruang publik yang mampu menjangkau lingkup yang lebih besar dari publik itu sendiri adalah televisi. Dalam media ini pun kecenderungan memprivatisasikan ruang publik mulai terasa lewat pelbagai program yang tidak mencerdaskan, bahkan menjelma sebagai ruang privat untuk membuktikan hal-hal yang tidak penting. Misalnya mencurahkan rasa cinta kepada pasangan untuk diketahui orang seantero nusantara, “*ngerjain*” teman satu *gank*, apakah ia benar-benar seorang penakut, lalu *ngetes* kesetiaan cinta pasangan, sampai adu nyali terhadap makhluk gaib. Ada juga ragam gosip yang dikemas sesuai segmentasi pasar; ada gosip yang kemasannya memang murahan, namun juga ada gosip yang penampilannya ala *Hollywood*.

Lebih menyedihkan lagi adalah kebanyakan ragam gosip tersebut menyebarkan isu murahan dengan berlindung di balik prinsip-prinsip jurnalistik. Kalimat yang sering terdengar adalah, "Si X telah hidup serumah tanpa ikatan pernikahan dengan pacar barunya." Setelah dikonfirmasi ternyata mereka tidak tinggal serumah, atau namun sangat sulit menghubungi telpon si X tersebut. Secara jurnalistik, seharusnya hal itu tidak layak dijadikan berita karena tidak ada unsur informasi, tetapi justru di sinilah kelihaihan menjual informasi dalam era terbuka seperti sekarang ini. Contoh lainnya bahkan *reuni sekolah* dan sebagainya bisa disiarkan di televisi sejauh ada yang bersedia dan mampu membayarnya, bisa atas nama *advertiser* atau kelompok.

Pernyataan ini tidak menutup mata untuk mengalakan bahwa media melulu menyuguhkan informasi yang tidak bernilai guna atau jauh dari praktik sebagai ruang publik. Media tetap mempunyai peluang berfungsi sebagai ruang publik, namun tidak terpungkiri bahwa proporsi program saja (televisi), didominasi oleh tayangan-tayangan hiburan. Bahkan munculnya banyak media televisi baru juga tidak mengubah konsep pertelevisian nasional menjadi lebih berpihak kepada publik, meskipun itu media yang mengklaim diri sebagai televisi khusus berita sekali pun.

Pertemuan antara arus globalisasi dengan transfer nilai-nilai baru dan terbukanya ruang kebebasan berekspresi menghasilkan isi media yang meninggalkan konsep lamanya ketika media secara umum dan televisi secara khusus hanya menjadi penyalur program-program pembangunan dan budaya selama hampir tiga puluh tahun. Namun demikian, perubahan dalam isi media dari model pesanan ke model kreasi dalam banyak hal hanya terlihat berhasil dari sisi kreativitas hiburan. Itu pun jika dinilai dari sisi ruang ekspresi bukan nilai gunanya.

Dalam dunia yang terus bergerak dengan ikon-ikon global yang melokal, pengemasan isi media dari sisi hiburan dan selera rendah menjadi komoditas yang sangat diminati pasar yang jenuh dengan peta perpolitikan dan kondisi perekonomian yang cenderung tidak stabil. Sisi buruknya adalah hal ini akan melenakan atau apa yang distilahkan sebagai *narcotization* khususnya bagi generasi yang lebih muda dengan frekuensi ekspose media lebih tinggi. Di sinilah tantangan bernegosiasi dengan para pengelola media swasta tersebut agar menciptakan media sebagai ruang publik.

Kalangan swasta tentu bergerak dengan motif ekonomi yang kental. Tidak ada yang patut dipersalahkan dalam tujuan ini. Hanya

saja, ia harus dikritik terus menerus ketika ada indikasi bahwa ruang publik semata-mata hendak dimanfaatkan untuk kepentingan terbatas, baik ekonomi maupun politis. Oleh karena itu, yang penting adalah melakukan usaha-usaha penyadaran publik akan informasi, hak-hak mereka dan kesadaran mereka untuk terlibat dalam isu-isu publik yang berdampak secara langsung atau tidak terhadap mereka.

Usaha-usaha seperti ini tidak ditujukan memusuhi media dan struktur kapitalistisnya. Bagaimanapun media adalah suatu *capitalist venture* yang harus hidup dari orientasi profit. Yang menjadi persoalan adalah media harus tetap berfungsi sebagai ruang publik meskipun ia dijalankan atas tarik-menarik antara motif ekonomi dan ideologi politisnya. Harus dipahami bahwa ruang publik dalam pengertian yang lebih luas memosisikan media sebagai ruang yang terbuka bagi mayoritas khalayak, dan media itu sendiri tampil dalam ragam sisi informasi yang sungguh-sungguh esensial dalam keragamannya.

Penelitian ini ingin melihat sejauh mana perkembangan pers Indonesia—setelah terbebaskan dari otoritarianisme Orde Baru—mampu menjadi lembaga pers yang tidak partisan, pragmatis dan memenuhi fungsi konsepsi ruang publik. Tentu terlalu dini menyimpulkan bahwa media di Indonesia sama sekali belum berfungsi sebagai ruang publik, namun hasil penelitian ini dan penelitian terdahulu menunjukkan indikasi yang kuat bahwa fungsi ruang publik media baik dalam pengertian *intra* dan *inter-media* masih rendah. Semoga hal ini menjadi bahan refleksi dan perbaikan demi kemajuan pers yang berpihak kepada publik di masa datang.

■ KESIMPULAN

Melalui realitas teks yang ditampilkannya, dapat disimpulkan beberapa poin penting hasil penelitian ini, antara lain:

- *Media Indonesia* mencermati konflik Aceh sebagai persoalan diskriminasi keadilan yang telah berlangsung lama sehingga harus segera dikembalikan sebagai solusi konflik. Oleh karena itu, pendekatan perdamaian melalui dialog tetap harus dikedepankan, namun cara yang memberi peluang terhadap lepasnya Aceh dari NKRI tidak ditoleransi.
- Prinsip konstruksi teks adalah penerjemahan ideologi pemilik media, Surya Paloh, yaitu konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk final dan tidak dibenarkan adanya usaha melepaskan diri (kemerdekaan) oleh siapapun,

karena persoalan apapun dan atas dasar apapun.

- Prinsip ideologis ini dipahami dengan baik dan dijalankan dengan patuh oleh para pekerjanya di pelbagai level konstruksi teks. Sebagai pemilik, Surya Paloh memiliki otoritas yang besar terhadap budaya organisasi dan peraturan yang menyertainya dengan segala kebijakan pemberitaan dalam produksi teks. Pengaruh ideologinya dalam teks terlihat dengan jelas terutama dalam produk editorial sebagai ruang pribadi media.
- Pencerminan terhadap ideologi tersebut juga terlihat jelas dalam teks berita yang menjadi ruang publik dan diperkuat pengakuan atau dukungan publik lewat komentar pembaca. Konstruksi teks tersebut dilakukan secara taat asas.
- *Media Indonesia* memunculkan dominasi bingkai pemberitaan dari perspektif nasionalisme sesuai dengan kebijakan ideologi pemilikinya. Dalam konstruksi realitas terhadap konflik Aceh (wacana referendum), *Media Indonesia* elitis, tidak memberikan akses secara proporsional terhadap publik nonelit. Kualitas diskusi isu seperti yang disyaratkan dalam praktik media sebagai ruang publik pun rendah.
- Konstruksi teks terhadap wacana referendum dengan pendekatan nasionalisme dan kritik yang tajam terhadap pemerintah dimungkinkan dalam suasana perubahan yang ditandai dengan keterbukaan informasi, kemandirian ideologi media, dan pengaruh eksternal media, yaitu publik yang merindukan pemerintahan yang kokoh.
- Tidak salah memunculkan ideologi media dalam menjalankan fungsi media sebagai ruang publik. Persoalannya adalah apakah media memonopoli realitas dengan hanya memberi ruang kepada kepentingan yang sesuai dengannya. Hasil penelitian ini dan bukti penelitian pendukung lainnya memberikan indikasi yang kuat bahwa media baru menjalankan kebebasan dirinya sebagai institusi, belum mewujudkan kebebasan informasi yang melibatkan publik.
- Kekhawatiran terhadap pergeseran fungsi media sangat beralasan karena didasarkan atas kenyataan bahwa media secara umum telah menjadi alat kepentingan yang cenderung mengabaikan publik.
- Media bagaimanapun diharapkan menjadi ruang publik yang mencerdaskan publik dan memberi ruang bagi keterlibatan publik terhadap diskursus isu. Peluang mewujudkan media sebagai ruang publik sudah terbuka lebar, tetapi dibutuhkan kesadaran media dan publik untuk memahaminya.

■ DAFTAR PUSTAKA

📖 Buku

- Anto, J. (ed.). *Luka Aceh, Duka Pers.* Kippas, 1999.
- Arthur, Asa Burger. *Media Analysis Techniques.* London: Sage Publication, 1986.
- Boyd-Barrett. *Conceptualizing the Public Sphere.* 1995.
- Eriyanto. *Analisis Framing.* Yogyakarta: LKIS, 2002.
- Eriyanto. *Analisis Wacana (Pengantar Analisis Teks Media).* Yogyakarta: LKIS, 2001.
- Fairclough, Norman. *Media Discourse.* Edward Arnold, 1995.
- Fakh, Mansour Dr.. *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi.* Insist Press, 2001.
- Fontana, Benedetto. *Hegemony and Power.* London: University of Minnesota Press, 1993.
- Gans, Herbert J.. *Multiperspectival News.* New York. Oxford University Press, 1992.
- Granham. *The Media and The Public Sphere.* 1990.
- Habermas, Jurgen. *The Theory of Communicative Action. Volume 1 & 2.* Beacon Press, 1989.
- Habermas. *Institution of The Public Sphere,* 1989.
- Haris, Syamsuddin. *Indonesia Diambang Perpecahan: Kasus Aceh, Riau, Irija dan Timtim.* Erlangga. Jakarta:1999
- Hisyam, Usamah,dkk. *Editorial Kehidupan Surya Paloh.* Jakarta: Yayasan Dharma Pena Nusantara, 2001.
- Macdonell, Diane. *Theories of Discourse: An Introduction,* 1986.
- Moeleong. Lexy J. Dr., MA.. *Metodelogi Penelitian Kualitatif.* Rosda Karya, 2001.
- Mosco, Vincent. *The Political Economy of Communication.* London: Sage, 1996.
- Mulyana, Dedy Dr.,MA.. *Metodelogi Penelitian Kualitatif.* Rosda Karya, 2001.
- Pane, Neta S.. *Sejarah dan Kekuatan Aceh Merdeka (GAM): Solusi, Harapan, dan Impian.* Grasindo. Jakarta: 2001.
- Rivers, William R.. *Editorial.* Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994.
- Sawitri, Isma. Zamzani A.. *Simak dan Selamatkan Aceh.* Panitia Peduli Aceh. Jakarta: 1999.
- Shoemaker, Pamela J dan Reese, Stephen D.. *Mediating The Message. Theories of Influences on Media Content.* USA: Longman Publisher, 1991.
- Sobur, Alex. *Analisis Teks Media.* Bandung: Rosdakarya, 2002.
- Sudibyoy, Agus. *Politik Media dan Pertarungan Wacana.* LKIS, 2001.
- Tim Redaksi LP3ES. *Politik Editorial Media Indonesia. Analisis Tajuk Rencana 1998-2001.* LP3ES, 2003.

📄 Artikel

- Achdian, Andi. *Tentang Nasionalisme Indonesia.* [Http://www.kompas.com](http://www.kompas.com). Selasa, 20 Agustus 2002.
- Anto, J. *Publik yang Mendamba Jurnalisme yang Berorientasi pada Penderitaan Rakyat Aceh.* Sumber: KUPAS Volume 3 No.4 Tahun 2002.

- Heryanto. Gun Gun. *Konstruksi Realitas Perang di Media Massa*. [Http://www.kompas.com./artikel/konflikdanmedia](http://www.kompas.com./artikel/konflikdanmedia). 3 April 2003.
- Hidayat, Dedy N. *PhD Public Sphere dan Hak Memperoleh Informasi*. [Http://www.google.com/artikel/public sphere](http://www.google.com/artikel/public sphere). 6 Agustus 2003.
- Redaksi di Hilversum. *Aceh Kini Benar-benar Menjadi Teater Perang*. [Http://www.kompas.com/ artikel/](http://www.kompas.com/ artikel/). ACEH. 22 Mei 2001.
- Simanjuntak, Agustinus. *Kasus Aceh dan Nilai Jual NKRI*. [Http://www.google.com/eskol-net](http://www.google.com/eskol-net). Senin 8 Desember 2002. 22:19:20.
- Sj Mandra, Adi Ahsan. *Konflik Aceh dan Sesat Tafsir Paradigma Nasionalisme*. [Http://www.kompas.com/artikel/aceh dan nasionalisme](http://www.kompas.com/artikel/aceh dan nasionalisme). Senin, 9 Juni 2003.
- Trijono, Lambang. *Diplomasi Sipil Untuk Penghentian Konflik Aceh*. Center for Security and Peace Studies, Gadjah Mada University, 28 November 2000.
- Van Klinken, Gerry. *Aceh Dalam Era Globalisasi*. [Http://www.insidenindonesia.org/artikel/](http://www.insidenindonesia.org/artikel/). Diskusi Bulanan Konflik, Aceh. 28 November 2000.
- Zada, Khamami. *Agama, Nasionalisme dan Gerakan Separatisme Aceh*. [Http://www.kompas.com/artikel/Aceh](http://www.kompas.com/artikel/Aceh). Senin 5 Mei 2003. 12:58:48.
- Zaki, *Media Memotret Konflik Aceh*. Sumber: KUPAS. Volume 3 No. 2 Tahun 2001.

❖ Berita

- "Aceh Antara GAM dan Komoditas Politik," *Kompas*, Minggu, 4 Mei 2003.
- "Dengung Kebanggaan Dalam Belantara Krisis," *Kompas*, Senin 11 Agustus 2003.
- "Kelompok Sipil Harus Dilibatkan Dalam Penyelesaian Konflik Aceh," *Kompas*, Senin 20 Agustus 2001.
- "Konflik dan Pencegahannya," *Kompas*, Minggu 19 Maret 2000.
- "Libatkan Sipil Dalam Proses Damai Aceh," *Kompas*, Sabtu 8 Februari 2003.
- "Mutlak Dibangun Mekanisme Resolusi Konflik," *Kompas*, Selasa. 20 Maret 2001.
- "Penyelesaian Konflik Tuntut Prakarsa Masyarakat," *Kompas*, Senin 26 November 2001.
- "Pengobar Perang di Aceh," *Kompas*, Minggu, 4 Mei 2003.
- "Rendah Partisipasi Masyarakat Sipil Dalam Pengambilan Keputusan," *Kompas*, Jumat. 20 Desember 2002.